



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 06 Juli 2026

Halaman: 3

13 Gepeng Terjaring di Kota Yogyakarta ✓

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggelar operasi gabungan penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) di sejumlah sudut kota pada Jumat (3/7) dini hari. Petugas menjangkau 13 orang gepeng yang kerap beraktivitas di jalan saat malam hari.

Operasi gabungan ini melibatkan personel dari Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Satpol PP, Kepolisian, Linmas, serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Petugas pun bergerak menyisir Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Kyai Haji (K.H.) Ahmad Dahlan yang selama ini menjadi titik rawan aktivitas gepeng.

Plt. Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari, mengungkapkan, operasi

tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menangani persoalan sosial di Kota Yogyakarta. "Secara khusus memang ada dua ruas jalan yang disasar, yaitu Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Jalan Brigjen Katamso," tandasnya, Minggu (5/7).

Dari hasil penyisiran tersebut, petugas mengamankan sedikitnya tujuh orang di kawasan Jalan Brigjen Katamso dan enam orang di sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan. Seluruhnya langsung diboyong menuju Selter Kesejahteraan Sosial untuk dilakukan pendataan.

"Jadi, totalnya ada 13 orang yang baru kami bawa, ditambah dua orang yang sebelumnya sudah berada di selter, sehingga saat ini ada 15 orang yang berada di

selter," terangnya.

Berdasarkan hasil asesmen awal, para gepeng penghuni selter tersebut berasal dari luar daerah, di antaranya dari Garut dan Temanggung. Hal itu secara tak langsung menunjukkan mobilitas antardaerah menjadi salah satu faktor pemicu persoalan sosial di wilayah hilir seperti Kota Yogya.

Heny menegaskan, Pemkot akan terus mengedepankan kolaborasi lintas sektoral agar penanganan masalah sosial ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan humanis. "Kami berkomitmen bersama seluruh stakeholder untuk menjaga Kota Yogya agar benar-benar nyaman. Kolaborasi ini yang kami tekankan, sehingga cita-cita mewujudkan kota yang asri, aman,

sehat, bersih, dan indah dapat terwujud," katanya.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, menegaskan, operasi gabungan ini didasarkan pada penerapan regulasi daerah, yakni Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. "Penjangkauan kami lakukan secara rutin sebagai bentuk komitmen penegakan Perda. Namun, yang lebih penting, kegiatan ini tidak semata-mata penertiban. Kami berkolaborasi dengan Dinas Sosial supaya mereka yang terjaring mendapatkan perlindungan, pendataan, dan penanganan yang sesuai, dengan pendekatan humanis," ucapnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005